

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : SEPTEMBER 2023

■ **Nusantara**

**Kades Diminta Hati-hati
Kelola Dana Desa!**

■ **Varia Senat**

**Akhiri Masa Sidang 2022-2023
Alkel DPD RI Laporkan Kinerja**



**Indonesia Dilanda
Kekeringan**

**DPD RI TAWARKAN
PROPOSAL SISTEM
KENEGARAAN**

SCAN
ME

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



9

772987

311004



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

**MA'ALUM
NABI MUHAMMAD SAW**





SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Oni Choiruddin

PEMIMPIN UMUM / PENANGGUNG JAWAB

Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI

Heru Firdan

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO

Agus Wiharto

SEKRETARIS REDAKSI

Theresia Oktavina

STAF REDAKSI

Betria Eriani, Adhelia Larasati,
Mas Aryo Kristiyanto, Arso P Nugroho,
Hestiana Kiftia Sari, Fandi Tri Prayogo,
Nanda Russia Rola

FOTOGRAFER

N.Nurdianto, Lela Sadiyah,
Dimas Yulian Santoso, Haryo C.Wicaksono,
Andrianto, Surya Pongsitanan,
Arifin Nur Wijaya, Prabandaru Ega Baskoro,
Fikri Muftih Akbar, Mujiono,
Unang Gunawan, Ryan Nur Fajry.

NARASUMBER/ KONSULTAN MEDIA

Syafuruddin Al, Syafril Amir, Boby Lukman
dan Nuryanto (Desain Grafis)

DISTRIBUSI

Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl.Jend.Gatot Subroto No.6
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com

Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id

// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //

FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter @dpdri

Pancasila dan Proposal DPD RI

DPD RI menawarkan sebuah pendekatan baru dalam sistem kenegaraan Indonesia, yaitu mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Ini terkait dengan pemahaman bahwa interpretasi Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dengan benar di masa sekarang.

Ada anggapan umum bahwa sistem kenegaraan yang merujuk pada rumusan para pendiri bangsa kita identik dengan sistem era Orde Lama dan Orde Baru. Namun, pada kenyataannya, sistem tersebut belum pernah diterapkan di kedua era tersebut.

Aspirasi mengem-Pancasila norma hukum bukan hanya dari DPD RI, dari berbagai masyarakat, tokoh organisasi, para raja dan kalangan akademisi.



untuk balikan sebagai tertinggi datang tetapi juga gai elemen termasuk purnawirawan, sultan, serta

Berdasarkan kajian akademik, perubahan konstitusi yang terjadi pada periode 1999 hingga 2002 telah menyebabkan Pancasila terpinggirkan sebagai norma hukum tertinggi dalam konstitusi negara.

Komisi Konstitusi yang dibentuk oleh MPR RI juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap amendemen konstitusi pada periode tersebut. Salah satu masalah krusial adalah absennya naskah akademik yang menjadi dasar perubahan, sehingga menghasilkan inkonsistensi dalam materi muatan UUD.

Untuk menjawab tantangan ini, DPD RI mengusulkan adanya penyempurnaan dan penguatan konstitusi melalui teknik adendum. Hal ini bertujuan agar implementasi Pancasila bisa lebih optimal dan sesuai dengan visi para pendiri bangsa.

Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam konstitusi adalah upaya untuk memastikan bahwa ideologi dasar bangsa Indonesia diterapkan dengan benar dan konsisten. Melalui pendekatan adendum yang diusulkan oleh DPD RI, diharapkan esensi Pancasila dapat kembali diterapkan sesuai dengan semangat para pendiri bangsa.

(*) **Pemred**



SENAT UTAMA

6



- DPD RI Tawarkan Proposal Sistem Kenegaraan
- DPD RI Usulkan MPR RI Kembali jadi Lembaga Tertinggi
- Jimly: DPD RI Tak Pernah Didengar
- Presidium Forum Nekarawan Dukung Gagasan DPD RI
- Seharusnya DPD RI Diperkuat Setara DPR RI
- Surya Paloh Sebut Pidato Ketua DPD RI Menarik
- DPD RI Sangat Diperlukan dalam Sistem Ketatanegaraan
- Wacana Pembubaran DPD RI Sebuah Pikiran Sesat
- Mari Hentikan Pilpres Ala Barat
- PDIP Akui Pilpres Langsung Berbiaya Politik Mahal
- Kemiskinan Struktural Sulit Dientaskan Pemda
- Presiden Jokowi:
DPD RI Aktif Serap Aspirasi Masyarakat Daerah
- Tanggapi Pidato RAPBN 2024 Sultan Apresiasi Kenaikan Gaji PNS
- Sidang Bersama DPR dan DPD RI Berjalan Lancar dan Sukses
- DPD RI Hadirkan 500 Teladan

SENAT KHUSUS

24



- Indonesia Dilanda Kekeringan
- Bersiaplah Hadapi Perubahan Iklim Global
- Pemerintah Harus Pastikan Keamanan Pangan Masyarakat
- Produksi Pangan Perlu Ditingkatkan
- Pemerintah Pastikan Beras Mencukupi
- Dampak El Nino Terkuat di Indonesia Ini Pesan BMKG untuk Masyarakat

NUSANTARA

31

- Kades Diminta Hati-hati Kelola Dana Desa!
- Nono: Pendidikan Kunci Kesuksesan
- Sultan in Melbourne: Unique Indonesian Democracy
- Penggunaan DBH Sawit Jangan Libatkan Pusat
- Anak Berkebutuhan Khusus di DIY Banyak Belum Nikmati Pendidikan
- Status Desa Tertinggal Sudah tidak Relevan
- Berdiri Sejak Tahun 2012:
Ibu Kota Kaltara Belum Daerah Otonom
- Abdullah Puteh Serahkan Bantuan Aspirasi Rehab Rumah
- Perpanjang Masa Jabatan Kades Hambat Proses Regenerasi

GALERI

34



VARIA SENAT**45**

- Akhiri Masa Sidang 2022-2023 Alkel DPD RI Laporkan Kinerja
- Senator Soroti Sistem Zonasi PPDB
- Sidang Paripurna DPD RI Apresiasi Kinerja Setjen
- Dikocok Ulang Pimpinan dan Anggota Alkel DPD RI
- Nono Terima Delegasi Dewan Federasi Rusia Bahas Kerja Sama Antara Kedua Negara
- BKSP Wants to Delve into the French Bicameral System
- Paripurna DPD RI Sahkan Pimpinan Alkel 2023-2024
- Mereka yang Bertahan Duduki Kursi Ketua Alkel

SUARA DAERAH**55**

- LKPASI Minta DPD RI Perjuangkan Hak Ulayat Kerajaan dan Masyarakat Adat

SEKRETARIAT JENDERAL**56**

- Terima Mahasiswa UMP Mahyu Jelaskan Sejarah Berdiri DPD RI
- Rayakan HUT Ke-4 DWP Setjen DPD RI Santuni Anak Yatim

KAJIAN DAERAH**58**

- Pentingnya Pembatasan Kekuasaan Kepala Desa Oleh Khusni Tamrin, S.Sos.*

GAGASAN**60**

- Resep Anti Negara Gagal Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ketua DPD RI

WISATA**61**

- Empat Destinasi Jateng Yang Menarik

**KULINER****62**

- Empat Kuliner Enak dari Riau





DPD RI TAWARKAN PROPOSAL SISTEM KENEGARAAN

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menawarkan proposal sistem kenegaraan, saat memimpin Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan Agustus 2023. Agenda sidang tersebut adalah penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI.





Pimpinan DPD RI foto bersama dengan Presiden dan Wapres sebelum digelar Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Dari kiri Mahyudin (wakil ketua), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (ketua), Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, Nono Sampono (wakil ketua) dan Sultan B Najamudin (wakil ketua). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sistem kenegaraan yang ditawarkan DPD RI tersebut, yaitu mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi negara sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa ini seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang asli. Kemudian dilakukan penyempurnaan dan penguatan melalui teknik adendum.

“Penyempurnaan dan penguatan perlu dilakukan untuk menjawab adanya anggapan bahwa sistem rumusan para pendiri bangsa kita identik dengan sistem era Orde Baru. Padahal faktanya, sistem tersebut be-

lum pernah diterapkan secara benar, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Jadi, penyempurnaan dan penguatan tersebut perlu dilakukan sebagai sebuah ikhtiar untuk mencegah terulangnya praktek yang tidak sempurna di masa lalu,” kata LaNyalla.

LaNyalla pun mengungkapkan bahwa aspirasi tersebut datang dari sejumlah elemen bangsa. Mulai dari kalangan tokoh organisasi masyarakat dan keagamaan, para purnawirawan TNI dan Polri. Raja dan Sultan Nusantara, hingga akademisi dan mahasiswa. Kemudian juga dari studi-studi dan kajian

akademik yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002, telah menghasilkan konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi.

Bahkan Komisi Konstitusi yang dibentuk MPR RI berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2002 yang bertugas melakukan kajian atas amandemen pada tahun 1999 hingga 2002 menyatakan; akibat tiadanya naskah akademik dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu penyebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur materi muatan UUD. (*)

DPD RI Usulkan MPR RI Kembali jadi Lembaga Tertinggi



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memimpin Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2023, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara khusus menawarkan proposal sistem kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut. Ada lima hal pokok dalam proposal kenegaraan tersebut.

Pertama, mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan, menampung semua elemen bangsa yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan.

Kedua, membuka pelu-

ang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta perseorangan atau nonpartai, sebagai bagian dari upaya memastikan proses pembentukan undang-undang tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja.

Ketiga, memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah, bukan penunjukan oleh presiden seperti pada era Orde Baru. Komposisi Utusan Daerah mengacu pada kesejarahan wilayah yang berbasis kepada negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para Raja dan Sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Sedangkan Utusan

Golongan diisi oleh organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi.

Keempat, memberikan kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang (RUU) yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh.

Kelima, menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk di era reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan. Dengan demikian, bangsa ini telah kembali kepada Pancasila secara utuh. (*)

Jimly: DPD RI Tak Pernah Didengar



Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie menjelang dimulainya Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2023. (Foto Tempo)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mendukung gagasan yang disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2023, untuk menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mendorong agar lembaga parlemen cukup dua, yakni DPR RI dan MPR RI. MPR RI sebagai *upper house* dan DPR RI *lower house*. Di MPR RI ditambah satu fraksi namanya perwakilan golongan. Sedangkan di DPR ditambah satu fraksi dengan nama perwakilan daerah.

Dengan demikian, kata ahli hukum tata negara itu, maka DPD RI dibubarkan dan masuk ke DPR RI, supaya lembaga DPD RI itu ada gunanya. “Selama ini DPD RI kayak LSM saja. Keberadaannya selama ini hanya memberi saran, pertimbangan, usulan, tapi tidak pernah didengar, jadi dia tidak memutuskan. Padahal DPD RI itu lembaga resmi,” kata Jimly.

“Usulan ini baik untuk membangkitkan rasa kritis terhadap sistem ketatanegaraan kita. Saya kira bagus sekali men-*trigger* apa yang disampaikan Ketua DPD RI itu. Paling tidak menggugah kita untuk memikirkan kembali melakukan perubahan kelima UUD 1945,” kata Jimly usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI.

Hanya saja, menurut Jimly, setiap usulan mengenai perubahan konstitusi, termasuk dalam melakukan amendemen Undang-Undang Dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan, tentunya harus dirembukkan secara matang. Tidak bisa memaksakan ide sendiri. Ide masing-masing itu banyak sekali.

Tidak menutup kemungkinan bahwa pembahasan mengenai amendemen UUD 1945 ini akan dilakukan. Namun, Jimly menyarankan sebaiknya pembahasan amendemen UUD 1945 itu dilakukan setelah Pemilu dan Pilkada 2024. Karena sudah ada kompromi pimpinan MPR bahwa perubahan kelima UUD 1945 sudah dihentikan tahun 2023 ini. (*)



Presidium Forum Negarawan Dukung Gagasan DPD RI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima Presidium Forum Negarawan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Presidium Forum Negarawan secara tegas menyatakan dukungannya terhadap gagasan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang disampaikan pada Sidang Bersama DPR-DPD RI, pada pertengahan Agustus 2023, yaitu terkait penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.

Presidium Forum Negarawan mendesak agar wacana kembali kepada UUD sesuai naskah 18 Agustus 1945 dapat dipercepat. Karena wacana untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli juga sudah digaungkan oleh tokoh-tokoh bangsa, seperti mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Try Sutrisno, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan yang paling intens sekaligus

sebagai inisiator adalah Ketua DPD RI, Mahmud Mattalitti.

“Saya kira, karena para tokoh nasional sudah satu pemikiran, bahwa bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, maka saya kira hal itu bisa segera direalisasikan,” kata Juru Bicara Presidium Forum Negarawan Sayuti Asyathri saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan Agustus 2023.

Bambang Sulistomo, anak pejuang Bung Tomo, juga menyampaikan bahwa saat ini negara ini tidak lagi mempraktikkan sistem Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Pancasila yang merupakan sistem tersendiri yang dirumuskan para pendiri bangsa. Karena itu, dia sangat setuju dengan gagasan yang disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla

Marsekal Muda (Purn) Tatang Kurniadi menambahkan, saat terjadi amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, rakyat sama sekali tidak diberi ruang untuk mendiskusikannya. “Sehingga hasil, amendemen konstitusi pada era Reformasi telah durhaka kepada para pendiri bangsa,” tegas mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) itu.

Sedangkan Tifauzia Tyasumma menyebutkan apa yang dijabarkan Ketua DPD RI sejalan dengan nuansa kebatinan Presidium Forum Negarawan. Dia menilai hal tersebut bukan lagi wacana, tapi sudah menjadi desakan yang kuat dari komponen masyarakat. “Saya kira harus sesegera mungkin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya. (*)

Seharusnya DPD RI Diperkuat Setara DPR RI

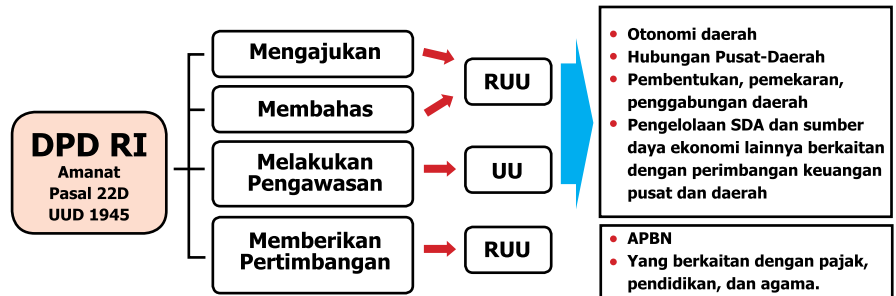
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sylviana Murni menegaskan keberadaan DPD RI mendorong percepatan pembangunan di daerah. Apalagi anggotanya yang dipilih langsung oleh rakyat tanpa melalui jalur partai politik, memiliki otoritas dan imunitas yang tidak mudah diintervensi oleh kelompok manapun.

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan DPD RI untuk mendukung kemajuan daerah secara universal. Tidak ada lagi daerah maju sendiri karena punya sumber daya dan kekuatan politik yang mumpuni. Sementara di sisi lain ada daerah tertinggal dengan sumber daya yang minim dan akses politik yang lemah.



Anggota DPD RI Sylviana Murni bersama Sekjen AIPA 2023 Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, saat menghadiri Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta, baru-baru ini. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPD RI



Sumber: Diolah dari buku *Rekam Jejak kelompok DPD di MPR 2004-2020*

“Maka peran DPD RI akan menjawab kegelisahan masyarakat daerah itu. Sepanjang pengalaman saya berkhidmat di DPD RI, banyak hal yang kemudian turut serta melakukan percepatan bagi kemajuan daerah. Dari peningkatan kualitas

masyarakat hingga infrastruktur daerah,” ujar Sylvi di Jakarta, pertengahan Agustus 2023.

Dia mencontohkan di Perancis, sistem bikameral itu berjalan dengan baik. Senator punya otoritas sama dengan DPR RI, sehingga tidak hanya berlaku sebagai pengawas RUU, tapi punya peran juga untuk menetapkan undang-undang. Bahkan dari sisi kajian kebijakan dan penentuan anggaran pun dilakukan secara bersama-sama. (*)

Surya Paloh Sebut Pidato Ketua DPD RI Menarik

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pidato yang disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dengan mengamendemen UUD 1945, merupakan hal yang menarik.

Penilaian Surya Paloh itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan usai dia menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan Agustus 2023.

“Hal yang menarik tadi adalah sambutan dari Ketua DPD RI, yang ingin membawa kembali sebuah pemikiran agar kita mengamendemen UUD 1945. Ingin menempatkan kembali posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Saya pikir ini luar biasa, pikiran-pikiran yang bagus, ya kan?” kata Surya Paloh.

Pendiri dan Ketua Umum Partai Nasdem itu menilai, gagasan yang disampaikan Ketua DPD RI tersebut merupakan sesuatu yang baik, karena nantinya pemilihan presiden akan dipilih kembali lewat MPR RI.

Konsekuensi nanti adalah pemilihan presiden tidak lagi secara langsung, tapi tentu ditempatkan melalui proses pemilihan di MPR itu sendiri.



Ketua Partai NasDem Surya Paloh menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI. (Foto Tvonenews.com)

Menurut pengakuan Surya Paloh, gagasan yang disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla tersebut sejalan dengan keinginan Partai NasDem. Karena itu, dia mengharapkan gagasan tersebut mampu direalisasikan lebih konkret lagi ke depannya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pidatonya ketika memimpin Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, menawarkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara yang meliputi lima hal pokok. Salah satunya adalah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan. (*)

DPD RI Sangat Diperlukan dalam SISTEM KETATANEGARAAN

Penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bukan sekadar persoalan penambahan kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran saja, tetapi lebih kepada penguatan fungsi lembaga sebagai perwakilan teritorial agar manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat di daerah.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menekankan kedudukan DPD RI sebagai perwakilan teritorial dalam struktur parlemen di Indonesia menjadi hal yang sangat fundamental. Karena sejak tahun 1999, Indonesia menganut prinsip pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam bingkai negara kesatuan.

“Dengan kewenangan yang ada saat ini saja, berbagai elemen di daerah sudah merasakan manfaat DPD RI. Setiap turun ke masyarakat baik di dapil masing-masing maupun ke berbagai daerah, rakyat begitu leluasa menyampaikan aspirasi-

nya kepada anggota DPD RI. Ini karena kami punya komitmen kuat untuk memperjuangkannya,” ujar Fahira Idris, pertengahan Agustus 2023.

Penguatan DPD RI bertujuan untuk lebih memaksimalkan potensi daerah, baik itu terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, hingga soal pajak, pendidikan, dan agama.

“Jika ingin bangsa ini terus melaju, kita harus mampu memaksimalkan institusi demokrasi seperti DPD RI, baik dalam posisinya sebagai *bridging* atau jembatan maupun sebagai perwakilan daerah. Terlebih, sejauh ini pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah belum terformat dengan baik. Artinya, DPD RI sangatlah diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang begitu kompleks ini,” kata Fahira. (*)



Anggota DPD RI Fahira Idris.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Wacana Pembubaran DPD RI Sebuah Pikiran Sesat

Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjadi sangat penting sebagai representasi daerah. Negara yang besar seperti Indonesia tidak bisa meniadakan keterwakilan daerah. Karena itu, wacana pembubaran DPD RI pun sebuah pikiran sesat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin pada forum group discussion (FGD) bertajuk “Memperkuat Sistem Ketaatanegaraan Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa Berdasarkan Pancasila”, di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Bali, baru-baru ini. Diskusi tersebut melibatkan *stakeholders*, seperti mahasiswa, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah di lingkungan Bali.

“Boleh saja mengubah nama lembaga ini, tapi rohnya harus tetap ada. Semestinya DPD RI sebagai regional *representative*, diperkuat agar menjadi seimbang dengan kekuatan DPR RI. Dengan demikian, daerah-daerah lebih berdaya dan bisa menghapus disparitas,” kata senator dari Kalimantan Timur itu.

Ketimpangan dan disparitas masih terjadi di Indonesia saat ini. Meski Indonesia sudah merdeka 78 tahun, namun masih banyak rakyat di daerah yang belum menikmati hasil kemerdekaan itu. Bahkan, internet dan listrik masih menjadi “barang langka” di beberapa daerah.

Sebagian warga di Kalimantan, terpaksa belanjanya ke Malaysia berjalan kaki. Masalah keadilan dan kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. Ketimpangan pembangunan juga terlihat di ibu kota. Di Jakarta banyak jembatan tanpa sungai, sementara di daerah lain banyak sungai yang enggak ada jembatannya. Saya lihat kesenjangan begitu tinggi. Kuncinya keadilan yang belum merata,” kata Mahyudin. (*)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

MARI HENTIKAN Pilpres Ala Barat



Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengharapkan momentum Peringatan Kemerdekaan Indonesia tahun ini dapat membangun kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk kembali kepada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa secara utuh. Salah satunya adalah dalam pemilihan presiden.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memasuki ruang sidang di Gedung Nusantara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Pemilihan presiden secara langsung yang diadopsi begitu saja dari negara barat, menurut LaNyalla, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang dijalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi.

Begini pula dengan elektabilitas para calon yang muncul, bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau pujipuja. Pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa.

“Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotism,” kata LaNyalla dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang

Bersama DPR dan DPD RI, pertengahan Agustus 2023.

Ke depan, sebut LaNyalla, Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, lebih

penting dan lebih mendesak, daripada bangsa ini disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala barat. Indonesia harus menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas, dalam menghadapi ledakan demografi penduduk usia produktif.

“Presiden harus mendapat dukungan penuh dari semua elemen bangsa. Sehingga percepatan terwujudnya cita-cita negara ini menjadi tekad bersama, seperti

yang pernah kita nyatakan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Semoga momentum Peringatan Kemerdekaan Indonesia kali ini, dapat membangun kesadaran kolektif bangsa Indonesia, untuk kembali kepada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa secara utuh,” kata LaNyalla. (*)





Hendrawan Supratikno
(Foto Tribunnews)

**Tubagus Ace
Hasan Syadzily**
(Foto Kompas.com)

PDIP Akui Pilpres Langsung Berbiaya Politik Mahal

Pidato Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023 yang meminta pemilihan presiden (pilpres) secara langsung, mendapat tanggapan dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.

Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengakui bahwa penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan presiden (pilpres) secara langsung yang sudah beberapa kali dilakukan selama era reformasi ada kekurangannya hingga berbiaya politik mahal *high-cost democracy*.

“Terkait penyelenggaraan pemilu, yang disampaikan ada benarnya. Demokrasi kita sekarang memang berbiaya mahal (*high-cost democracy*). Bahkan ada yang menyebut demokrasi transaksional kriminal. Ini tantangan kepada kita untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” kata Hendrawan Supratikno seperti dikutip Detik.com, pertengahan Agustus 2023.

Pernyataan berbeda dilonarkan politikus Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily. Dia tidak sepatutnya dan tidak setuju dengan pernyataan Lanyalla yang mengusulkan

pemilihan presiden dikembalikan ke MPR RI. Alasan Ace, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan mandat reformasi. Di mana rakyat menginginkan untuk memilih langsung presidennya.

Menurutnya, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan cermin dari kedaulatan rakyat. Dengan sistem itu, lanjutnya, rakyat secara langsung menggunakan hak politiknya. “Jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR RI, maka dengan sendirinya mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Ini pasti membutuhkan amendemen UUD 1945. Secara sistem politik, demokrasi kita akan kembali mundur ke belakang,” ujarnya seperti dikutip Detik.com. (*)



Kemiskinan Struktural Sulit Dientaskan Pemda



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memimpin Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mengunjungi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam kunjungannya itu, senator atau anggota DPD RI melihat dan mendengarkan langsung apa yang disuarakan masyarakat di daerah.

DPD RI sangat menghargai upaya cepat pemerintah dalam membangun infrastruktur di daerah-daerah untuk menjawab kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Namun semuanya itu dinilai belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat di daerah, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan.

“Kami masih menemukan fakta, persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan oleh pemerintah daerah,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika memimpin Sidang

Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, pertengahan Agustus 2023.

DPD RI juga memberi apresiasi atas upaya pemerintah memberikan bermacam bantuan, sebagai bantalan sosial kepada masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui puluhan program kementerian dan badan. Tetapi, program yang bersifat karitatif dan kuratif tersebut, hanya mengobati gejala dari suatu penyakit yang sesungguhnya.

Karena persoalan yang sesungguhnya, dan paling mendasar menurut DPD RI adalah, sebagai bangsa telah kehilangan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa yang melahirkan tekad bersama, seperti yang pernah dirasakan ketika bangsa ini mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. Saat itu bangsa ini mampu melewati masa sulit dan ujian demi ujian dalam mempertahankan kemerdekaan. (*)

Presiden Jokowi: DPD RI Aktif Serap Aspirasi Masyarakat Daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah aktif menyerap aspirasi masyarakat di daerah-daerah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki DPD RI, sebagai lembaga representasi daerah.

Disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tanggal 16 Agustus 2023.

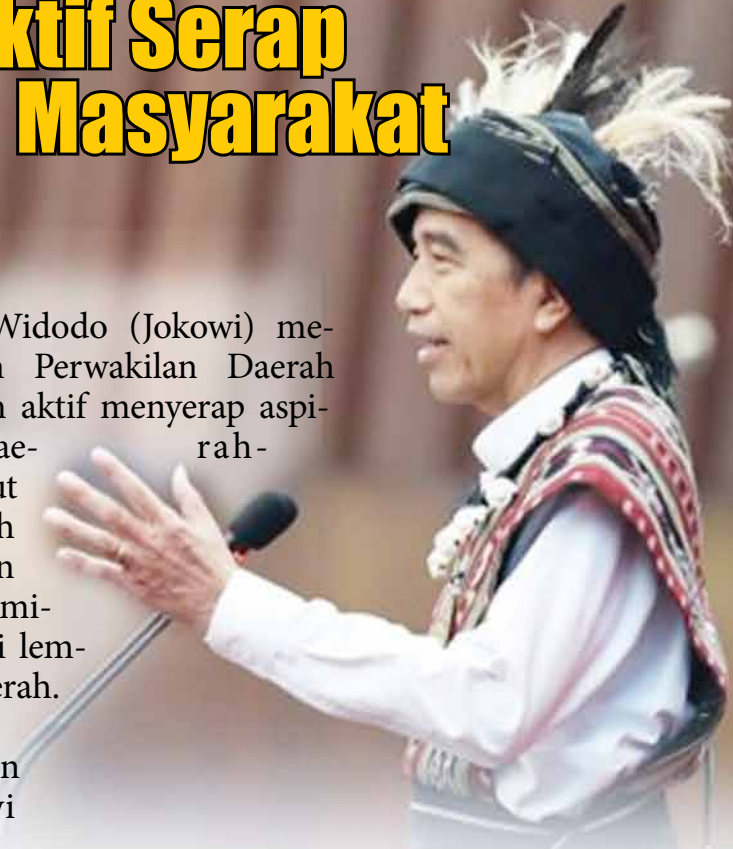
Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI tersebut sudah menjadi agenda rutin tahunan yang digelar sehari sebelum peringatan HUT Kemerdekaan RI. Agenda utama dari sidang tersebut adalah penyampaian kinerja lembaga-lembaga negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, Presiden Jokowi juga menilai DPD RI telah berperan aktif dalam penyusunan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Seperti diketahui, dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPD RI ikut menyusun dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah sampai pem-

bahasan tingkat I bersama DPR RI dan Pemerintah.

Selain itu, Presiden Jokowi juga “memuji” DPD RI yang telah melakukan telaah terhadap sistem tata negara. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pidatonya saat memimpin Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2023 tersebut, menawarkan proposal sistem kenegaraan. Sistem yang ditawarkan itu berdasarkan kajian akademik dan berdasarkan aspirasi yang diserap DPD RI dari berbagai elemen masyarakat dan perguruan tinggi.

“DPD RI sesuai dengan kewenangannya telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita,” kata Presiden Jokowi ketika menyampaikan kinerja lembaga-lembaga negara. (*)



Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia dan penyampaian kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Tanggapi Pidato RAPBN 2024 Sultan Apresiasi Kenaikan Gaji PNS



Setelah menerima pengantar RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangan dari Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkannya kepada Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri sebesar delapan persen, serta uang pensiun PNS 12 persen pada tahun 2024. Hal tersebut akan berdampak positif bagi kinerja konsumsi dalam menopang pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Menurutnya, harapan pemerintah untuk meningkatkan kinerja PNS dengan meningkatkan insentif fiskal sangat beralasan di tengah tuntutan merit sistem birokrasi saat ini. ASN didorong untuk meningkatkan kapasitas dan etos pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dan membantu agenda strategis pemerintah.

Namun yang lebih penting lagi menurut Sultan yang harus diperhatikan pemerintah adalah soal nasib tenaga honorer. Pemerintah perlu segera memberikan kejelasan terkait masa depan para pegawai pemerintah yang berstatus sebagai tenaga honorer tersebut. Karena mereka juga merupakan pembantu pemerintah yang harus diperhatikan secara serius.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan menaikkan gaji PNS sebagai kado pada HUT ke-78 Kemerdekaan RI, tapi hadiah kemerdekaan ini harus dirasakan juga oleh semua elemen bangsa, terutama para pembantu pemerintah. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk

memperbaiki definisi ASN secara akomodatif,” kata Sultan menanggapi RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2023. Rapat tersebut digelar usai Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI.

Tidak kalah pentingnya yang juga harus mendapat perhatian pemerintah menurut Sultan, adalah nasib petani. Sultan berharap agar pemerintah kembali meningkatkan subsidi di sektor pertanian, terutama subsidi pupuk dan bibit unggul bagi para pelaku usaha tani di daerah. Para petani di daerah masih mengeluhkan penetapan subsidi pupuk yang sangat terbatas saat ini. Kebijakan tersebut cukup membebani biaya produksi petani. (*)

SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD RI BERJALAN LANCAR DAN SUKSES



Suasana Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR- DPD RI Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Antara)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada tahun 2023 ini menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Pelaksanaan Sidang Bersama tersebut sudah berjalan dengan lancar dan sukses, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tanggal 16 Agustus 2023.

Sidang Bersama DPR dan DPD RI sudah menjadi agenda rutin tahunan di Parlemen Senayan, yang pelaksanaannya sehari sebelum peringatan HUT Kemerdekaan RI. Agenda utamanya adalah penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Indonesia dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Tuan rumahnya pun digilir antara DPR RI dan DPD RI. Tahun

ini DPD RI lah yang menjadi tuan rumah.

Pelaksanaan Sidang Bersama tahun ini merupakan yang pertama setelah pandemi Covid-19. Sudah tidak lagi menerapkan protokol kesehatan (prokes). Hanya saja, Sidang Tahunan MPR RI yang diisi dengan penyampaian kinerja lembaga-lembaga negara, tetap dalam disatukan dengan Sidang Bersama, seperti tahun sebelumnya. Makanya sidang dibuka Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan ditutup oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Seperti biasa pada tahun-tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, dan

Sidang Bersama DPR dan DPD RI, mengenakan pakaian adat. Kali ini Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar, Maluku. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Betawi.

Selain Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, juga terlihat undang yang hadir mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan para mantan Wakil Presiden RI, mantan Ketua MPR RI/ DPR RI/DPD RI, pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, ketua umum partai politik yang mewakili keterwakilan di DPR RI, raja-raja nusantara, ketua ormas keagamaan serta perwakilan teladan dari seluruh nusantara. (*)



DPD RI Hadirkan 500 Teladan





Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghadirkan sebanyak 500 teladan untuk mengadiri secara langsung Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2023, pada tanggal 16 Agustus 2023, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Mereka ditempatkan di lobi Gedung Nusantara IV dan IV Komplek Parlemen Senayan. Mereka mengikuti dan menyaksikan Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI melalui layar lebar yang dikoneksikan dari Gedung Nusantara, tempat sidang berlangsung.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menampilkan putra dan putri terbaik kita. Mereka semua telah mengerjakan

hal yang terbaik dan berhasil mengibarkan Sang Merah Putih pada tiang-tiang prestasi kebanggaan bangsa. Hari ini mereka hadir dalam sidang dewan yang mulia ini,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memimpin sidang.

LaNyalla menyebutkan, para teladan yang dihadirkan itu berasal dari seluruh Indonesia. Mereka berasal dari 10 kementerian, badan dan lembaga, serta 21 perwakilan Raja dan Sultan Nusantara sebagai bagian dari sejarah kewilayahan Nusantara dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rinciannya adalah 48 teladan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 180 teladan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 144 teladan

dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 6 teladan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemendikbudpar) dan 60 teladan dari BKKBN.

Kemudian 12 teladan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 8 teladan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 6 teladan Parlemen Remaja dari DPR RI, 10 teladan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta, 20 Teladan dari Kementerian Pertanian.

Selain menghadirkan 500 teladan, dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, juga dipersembahkan lagu-lagu 13 daerah yang dibawakan oleh Korps Musik Sekolah Tinggi Intelijen Negara. (*)



dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekurangan air bersih, tetapi juga menyebabkan pertanian mengalami gagal panen. Dampaknya pun sangat luar biasa. Dari Papua Tengah dilaporkan, ada enam orang meninggal dunia akibat kelaparan karena gagal panen.

Indonesia Dilanda Kekeringan

Berbagai wilayah di Indonesia kini tengah dilanda bencana kekeringan yang dipicu oleh munculnya fenomena El Nino. Kemunculan El Nino yang bersifat global itu bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan musim kemarau di Indonesia lebih kering lagi.

Bencana kekeringan itu berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. Tidak saja

Dalam menghadapi bencana kekeringan tersebut, sejumlah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Pemerintah Kabupaten Bogor misalnya, telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan terhitung 10 Juli hingga Oktober 2023. Status siaga darurat kekeringan itu dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor: 300.2/11/SE -SDB/BPBD.

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak fenomena El Nino di Indonesia diperkirakan akan

terjadi pada Oktober hingga November 2023 mendatang. “Kondisi udara di wilayah Indonesia pada pertengahan Agustus hingga September mendatang akan lebih kering,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, awal Agustus 2023, seperti dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, World Meteorological Organization (WMO) sudah memperkirakan intensitas kejadian ekstrem seperti kekeringan dan kelangkaan pangan serta kelaparan global. Bahkan, WMO memprediksi intensitas ancaman tersebut akan semakin tinggi dalam tempo waktu satu hingga lima tahun ke mendatang.

Bahkan, pada akhir Juli 2023, Sekjen PBB Antonio Guterres mengumumkan bahwa era pemanasan global telah berakhir dan era pendidihan global telah tiba. Ia menegaskan bahwa kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat celsius akan sulit ditahan apabila tidak ada aksi radikal semua negara dan lembaga global. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung mengingatkan bangsa ini untuk terus waspada. (*)

Bersiapalah Hadapi Perubahan Iklim Global

Lahan tandus kekeringan akibat kemarau di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. (Foto Viva)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pemerintah mengantisipasi untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang terjadi dampak dari perubahan iklim global yang disebabkan fenomena El Nino. Kekeringan yang terjadi akibat perubahan iklim tersebut kemungkinan petani akan mengalami gagal panen.

Apalagi World Meteorological Organization (WMO) memperkirakan intensitas kejadian ekstrem seperti kekeringan dan kelangkaan pangan serta kelaparan global. Bahkan, WMO memprediksi intensitas ancaman tersebut akan semakin tinggi dalam tempo waktu satu hingga lima tahun ke mendatang.

Ancaman ketersediaan pangan dunia tidak bisa dianggap mudah, karena Indonesia masih banyak mengimpor bahan-bahan kebutuhan pangan, seperti beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula. Masalah pangan merupakan masalah yang mendasar dan pokok. Negara tentu saja harus segera menyiapkan langkah-

langkah yang konkret.

“Artinya, kita harus bersiap dari sekarang untuk memperbaiki lingkungan hidup kita. Salah satu upaya yang bisa kita dilakukan adalah dengan melakukan reboisasi dan menyiapkan bioteknologi pertanian,” kata senator dari Jawa Timur, awal Agustus 2023.

Ancaman krisis pangan juga imbas dari perang Rusia-Ukraina. Di mana Rusia pada 17 Juli lalu menarik diri dari kesepakatan yang membolehkan pengiriman komoditas pangan komersial dan pupuk dari Ukraina, melalui Pelabuhan Laut Hitam (*Black Sea Grain Initiative/BSGI*). Langkah Rusia tersebut berpotensi mengguncang harga pangan dunia.

Oleh karenanya, antisipasi potensi lonjakan harga pangan di dalam negeri harus segera dilakukan, baik dari imbas langkah Rusia maupun dari ancaman El Nino berakibat bencana kekeringan yang diprediksi puncaknya terjadi pada Agustus-September mendatang. (*)



Pemerintah Harus Pastikan Keamanan Pangan Masyarakat

Gagal panen akibat bencana kekeringan di Papua. (Foto BPBD Papua)

Indonesia kini tengah menghadapi ancaman bencana kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino saat ini. Karena itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk memastikan pasokan dan keamanan pangan masyarakat terpenuhi akibat bencana kekeringan tersebut.

Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, pemerintah harus bergerak cepat mendistribusikan bahan pangan pokok khususnya beras ke setiap daerah, khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Pemerintah di daerah 3T juga harus memiliki data jumlah penduduk dan stok pangan yang akurat dan update. Sehingga potensi terjadinya kelangkaan dan inflasi

harga pangan di daerah dapat dihindari.

“Masyarakat pedalaman yang menggantung pasokan pangan dari alam menjadi sangat rentan dengan isu kekurangan pangan akibat kemarau panjang. Sehingga mengkonsumsi bahan pangan lokal tanpa jaminan keamanan menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Akhirnya meninggal akibat diare,” kata Sultan, awal Agustus 2023.

Terkait adanya kabar meninggal dunia enam orang masyarakat Papua Tengah, senator dari Bengkulu itu meminta pemerintah memiliki penjelasan yang benar dan tidak perlu menutup-nutupinya. Apakah kematian itu akibat karena kelaparan atau mengkonsumsi pangan yang tidak aman.

“Jika benar terjadi kematian warga masyarakat akibat kekurangan pangan yang aman, tentu ini menjadi peringatan akan darurat keamanan pangan nasional. Tapi alasan mengapa masyarakat mengkonsumsi pangan yang tidak aman tentu jauh lebih penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah”, tutupnya.

Kementerian Kesehatan akan menginvestigasi penyebab kematian enam warga Papua Tengah itu. Apakah enam warga tersebut meninggal akibat kelaparan atau yang lainnya. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menepis bahwa enam warga Papua meninggal karena kelaparan. Penyebab meninggal karena bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Puncak, Papua Tengah. (*)

Produksi Pangan Perlu Ditingkatkan



Anggota DPD RI Abdi Sumaithi, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar. (Foto Tempo)

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengakui tantangan pertanian yang dihadapi Indonesia saat ini memang berat. Pasalnya, selain dampak pandemi Covid-19 masih terasa, pada waktu yang hampir bersamaan Indonesia dihadapkan pada perubahan iklim berupa kemarau panjang akibat dampak fenomena El Nino.

Karena itu, anggota DPD RI asal Provinsi Banten Abdi Sumaithi mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) mengamankan peningkatan produksi pangan, terutama padi dalam menghadapi ancaman bencana kekeringan yang melanda Indonesia, seperti yang terjadi saat ini.

“Peningkatan produksi pangan dalam menghadapi kekeringan itu perlu dilakukan karena jumlah penduduk semakin banyak. Saya kira peningkatan produksi padi itu merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk sekaligus instrumen stabilisasi ekonomi,” kata Abdi di Serang, Banten, akhir Juli 2023.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang melakukan kunjungan Provinsi Banten tersebut untuk memastikan langkah-langkah antisipasi dampak El Nino bisa berjalan dengan baik di semua wilayah termasuk Banten. Apalagi Banten merupakan salah satu wilayah penyangga produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.

“Oleh karena itu, sektor pertanian harus dipastikan aman dan terus berproduksi terlebih di bawah ancaman perubahan iklim dan El Nino. Kita harus mengoptimalkan gerakan percepatan tanam menghadapi El Nino,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan selama ini Banten memberikan kontribusi cukup besar terhadap produksi padi secara nasional. Bahkan, peringkat produksi padi Banten yang semula di nomor 11, kini menjadi peringkat 8 secara nasional. Pihaknya pun terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan di tengah ancaman El Nino yang puncaknya diperkirakan pada Agustus-September 2023. (*)



Pemerintah Pastikan Beras Mencukupi



Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas ketersediaan dan keterjangkauan beras nasional. (Foto Setkab)

Pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional mencukupi dalam menghadapi bencana kekeringan yang melanda Indonesia saat ini. Bencana kekeringan yang dipicu musim kemarau panjang dan diperparah lagi dengan fenomena El Nino tersebut berdampak pada keterbatasan air dan membuat produktivitas pertanian menurun.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebutkan ketersediaan beras nasional berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh kementerian yang dipimpinnya tersedia cukup baik hingga bulan September 2023. Sampai September masih punya

overstock di atas 2,7 juta ton.

“Artinya dari setiap bulan masih ada panen di atas 800 ribu hektare yang menghasilkan cukup untuk kebutuhan setiap bulannya di atas 2 jutaan,” jelas Mentan kepada awak media, usai rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, awal Agustus 2023.

Dalam ratas tersebut membahas ketersediaan dan keterjangkauan beras nasional tersebut, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk mempersiapkan dan memastikan ketersediaan beras nasional dalam menghadapi fenomena El Nino yang memicu kekeringan dan menurunnya

produktivitas pertanian..

Mentan juga menyebutkan bahwa pihaknya akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untukantisipasi El Nino. Walaupun banyak mengkhawatirkan dampak El Nino menyebabkan kekeringan sumber air untuk pertanian, namun beberapa waduk dan dam yang besar ternyata airnya cukup.

Dia meyakini bahwa komitmen bersama dari pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk mempersiapkan diri menghadapi El Nino. Sejumlah daerah di Tanah Air telah menyatakan kesiapannya mempersiapkan lahan pertanian untuk memastikan ketersediaan beras nasional terpenuhi. (*)

DAMPAK EL NINO Terkuat di Indonesia



Penyaluran bantuan dari pemerintah untuk warga terdampak kekeringan di Papua Tengah. (Foto BNPB)

El Nino merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Suhu menjadi yang lebih hangat dari biasanya ini mengakibatkan pengurangan udara basah di wilayah sekitarnya yang pada akhirnya ikut menaikkan suhu.

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) A Fachri Radjab, akhir Juli 2023 menjelaskan fenomena El Nino turut berpengaruh terhadap pola cuaca global, termasuk di Indonesia. Artinya fenomena ini bersifat global dan tidak

hanya terjadi di Indonesia.

Dampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi di Indonesia dampak yang paling kuat dirasakan adalah berkurangnya curah hujan. Ketika kita di musim kemarau ditambah El Nino maka menjadi semakin kering wilayah kita. Itu dampaknya yang jelas terjadi,” jelas Fachri.

BMKG memprediksi fenomena El Nino di Indonesia masih akan bertahan hingga Desember 2023. Namun dampaknya akan semakin berkurang seiring dengan datangnya musim hujan pada November 2023.

Menurut analisis BMKG, fenomena El Nino telah mengakibatkan kemarau di 63 persen wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

BMKG mencatat fenomena El Nino telah terjadi beberapa kali di Indonesia, termasuk pada tahun 2015 dengan intensitas kuat dan pada tahun 2019 dengan intensitas lemah. Namun BMKG memperkirakan musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. (*)



Ini Pesan BMKG untuk Masyarakat

Warga Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memanfaatkan air bersih yang dikirim pemerintah setempat karena musim kemarin, pada pertengahan Juni 2023. (Foto BPBD Cilacap)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak fenomena El Nino terjadi pada bulan Agustus hingga September 2023. Bahkan BMKG memprediksi fenomena El Nino di Indonesia akan bertahan hingga Desember 2023, dan mulai berkurang bulan November karena sudah mulai musim hujan.

Berdasarkan hasil analisis BMKG menyebutkan bahwa seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara diprediksi memiliki curah hujan paling

rendah dan berpotensi mengalami musim kering yang ekstrem.

Karena itu, BMKG telah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan tiga hal dalam mempersiapkan kebutuhan air bersih guna mengantisipasi terjadinya kondisi yang ekstrem disebabkan kemarau dan fenomena El Nino. Tiga hal tersebut, yaitu:

Memanfaatkan hujan yang masih ada

Masyarakat hendaknya memanfaatkan hujan yang masih mungkin turun pada masa sekarang melalui gerakan panen hujan. Pasalnya, fenomena El Nino pada umumnya memang memberikan dampak berkurangnya curah

hujan di wilayah Indonesia dan berpotensi menimbulkan kekeringan meteorologis.

Masifkan gerakan hemat air

Ketersediaan air di tengah fenomena El Nino sangat mungkin akan berkurang. Hal ini salah satunya dipicu oleh kondisi iklim yang panas dan mengakibatkan kekeringan di sejumlah daerah. Ditambah lagi, intensitas hujan yang mulai berkurang.

Siapkan tempat cadangan air

Masyarakat hendaknya menyiapkan tempat-tempat cadangan air untuk keperluan kebutuhan air. Hal ini penting guna memastikan pasokan air tetap tersedia di tengah El Nino tidak kunjung berakhir. (*)



Kades Diminta Hati-hati Kelola Dana Desa!

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Bupati Malang HM Sanusi, Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat dan para kepala desa se-Kabupaten Malang pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang, di Malang, akhir Juli 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan agar para kepala desa (kades) untuk berhati-hati dan cermat dalam pengelolaan keuangan atau dana desa. Sebab, jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa bisa berimplikasi pada hukum. Dari pengalaman yang sudah ada sudah tidak sedikit kepala desa terjerat hukum.

LaNyalla pun melansir data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022. Ada 155 kasus hukum pengelolaan dana desa yang melibatkan 252 orang sebagai tersangka, termasuk para kepala desa. Dengan rata-rata perkara berkaitan dengan *mark up* rencana anggaran biaya, *mark up* honor perangkat desa, pemo-

tongan dana desa, perjalanan dinas fiktif, dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan.

“Dari data yang ada, masih banyak kasus hukum yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi akibat kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu terkait pengelolaan keuangan desa penting untuk benar-benar dicermati,” kata LaNyalla dalam acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang, di Malang, akhir Juli 2023


Sebagai bagian dari entitas pemerintahan terkecil di Indonesia, desa harus memiliki peran sebagai penjaga pondasi kekuatan dalam menghadapi tantangan yang semakin berlarut ke depan. Termasuk

ketahanan pangan, kesehatan, dan sosial yang meliputi pendidikan dan perilaku kehidupan dalam menghadapi perubahan.


Untuk mencapai peran itu, desa harus melakukan 5 hal prioritas. Pertama, pengembangan kapasitas aparatur desa. Kedua, peningkatan kualitas manajemen pemerintahan desa, Ketiga, perencanaan pembangunan desa, Keempat pengelolaan keuangan desa. Kelima, melakukan penyusunan peraturan desa.

“Khusus terkait pengelolaan keuangan desa, harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai akibat ketidaktahuan, menjadikan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi,” tegas Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan. (*)

Nono: PENDIDIKAN Kunci Kesuksesan



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono menghadiri “Gebyar Anak Aru Utara” dalam rangka menperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2023 di Aru Utara, Provinsi Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, akhir Juli 2023.



Pada kesempatan itu, Nono Sampono berpesan agar para orang tua terus mendorong anaknya untuk rajin dan berprestasi di sekolah. “Karena dengan bersekolah kita bisa mengubah nasib untuk menjadi lebih sejahtera, yang pada gilirannya kita dapat membuat daerah kita semakin maju dan sejahtera,” pesan Nono.

Untuk memotivasi anak-anak Kepulauan Aru rajin bersekolah, Nono pun menceritakan kisah hidupnya kepada anak-anak setempat. Nono mengisahkan bahwa dirinya berlatar belakang dari keluarga tidak mampu. Profesi ayahnya sebagai sopir angkot. Namun semuanya itu tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap berusaha meraih masa depannya. “Pendidikan merupakan kunci seseorang menjadi sukses. Sebab, tidak ada kesuksesan tanpa pendidikan,” kata Nono.



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama Bupati Kepulauan Aru Johan Gongga dan pejabat setempat saat menghadiri "Gebyar Anak Aru Utara" dalam rangka menperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2023 di Aru Utara, Provinsi Kepulauan Aru. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Nono juga berpesan agar generasi Kepulauan Aru untuk terus berperan aktif di dalam dunia pendidikan. Walaupun disadari bahwa masih banyak kekurangan dari berbagai segi. Namun semuanya itu harus di jadikan sebagai motivasi untuk tetap berjuang menggapai masa depan yang lebih baik.

Nono Sampono juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Kepulauan Aru Johan Gongga atas realisasi Visi dan Misi Aru Cerdas Rakyatku, Sehat Negeriku. Bahwasanya benih atau d a s a r

hidup sehat insan, akan membuahk an insan yang cerdas, kreatif, inovatif dan berdaya saing sebagai aset dalam menggerakkan roda pembangunan ke depan di segala bidang.

Bupati Kepulauan Aru Johan Gongga memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan Pengajar Muda Indonesia Mengajar, langkah mereka dinilai telah memberikan terobosan penting bagi kemajuan pendidikan di Aru. Bupati juga berharap peran pengajar muda dapat didukung sepenuhnya

oleh semua stakeholder karena merupakan tugas bersama dalam memberikan masa depan yang terbaik bagi anak.

Pemerintah Daerah Kepulauan Aru telah memberikan program beasiswa di berbagai perguruan tinggi dan telah meluluskan 300 di S e - kolah Tinggi Migas Cepu, 350 sarjana perikanan, 250 sarjana perawat dan kebidanan, 200 sarjana koperasi, serta 92 sarjana kedokteran. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian RUU APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangannya, 16 Agustus 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin di barisan kedua saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, 16 Agustus 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima kunjungan Wakil ketua Komite Utusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia Andrey Denisov, ke DPD RI, awal Agustus 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi anggota DPD RI Bustami Zainudin dalam acara "Aspirasi Masyarakat bertema Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia" di Gedung Kadin Jawa Timur, pertengahan Agustus 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sekjen DPD RI Rahman Hadi saat menghadiri rapat koordinasi yang membahas persiapan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023, awal Agustus 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Biro PHM Setjen DPD RI)



Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma (kanan) bersama Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Palevi, Deputy Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Siti Fauziah, dalam rapat koordinasi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPD RI penyampaian Pidato Presiden RI tentang RAPBN 2024, akhir Juli 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).





SULTAN IN MELBOURNE: UNIQUE INDONESIAN DEMOCRACY

Indonesia's democracy is perceived by several global institutions to still be at a standstill and stagnation post-reform era. According to the latest report from the Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia's democracy index scored 6.71 in 2022, the same as in 2021. This classification falls under flawed democracy. Despite the consistent score, Indonesia's global ranking has slipped from 52 to 54.

The ebb and flow of Indonesia's democracy index cannot be separated from the political dynamics and the state governance system, which tends to be unbalanced. The government leans more towards economic development, creating a socio-political stability that risks stunting democracy.

"The multi-party political system and presidentialism actually become a burden for democracy due to the imbalance in the structure of Indonesia's state governance," said Vice Chairman of the Regional Representative Council (DPD RI) Sultan B Najamudin at a forum attended by several law professors and constitution experts from Melbourne University, Aus-

tralia, in late July 2023.

Although socio-politically, the anomaly of Indonesian democracy actually stands out as a peculiarity and uniqueness in the global democratic perspective. This is because each country has a different historical and socio-cultural background, which impacts its current democratic practices.

"It must be admitted that since the beginning of independence, many regimes have neglected the democratic political culture values and civil liberties in Indonesia. Political p a r -

ties, which should act as pillars of democracy, are merely positioned like profit institutions seeking economic political gains," said Sultan.

On this occasion, Prof. Lindsey, a constitutional expert from Melbourne University, expressed his willingness to visit Indonesia to share his views on democracy and the state governance system with the DPD RI. This is in hopes of finding the right state governance formula to strengthen the DPD RI institution and make it more beneficial for the people. (*)



Vice Chairman of the DPD RI, Sultan B Najamudin, accompanied by constitutional expert from Melbourne University, Prof. Lindsey. (Photo by Biro PHM Setjen DPD RI)

Penggunaan DBH Sawit Jangan Libatkan Pusat

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah mengalokasikan dana bagi hasil (DBH) sawit secara proporsional kepada daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2023. PP tersebut, cukup menjawab aspirasi kepala daerah penghasil sawit selama ini.

Alokasi DBH sawit dinilai sangat dibutuhkan daerah dalam mengurangi kesenjangan fiskal, terutama dalam membangun dan merawat sarana dan infrastruktur dasar yang terkait langsung dengan industri perkebunan kelapa sawit. “Dengan ruang fiskal yang lebih luas diharapkan daerah penghasil sawit mampu meningkatkan produktivitas sawit berikut produk turunannya secara berkelanjutan,” kata Sultan akhir Juli 2023.

Hanya saja para kepala daerah diingatkannya perlu menjaga kinerja dan performa realisasi anggaran DBH secara tepat guna dan akuntabel. Kepada pemerintah pusat dimintanya tidak perlu terlibat dalam proses realisasi anggaran DBH sawit di daerah. Pemerintah daerah harus diberikan kebebasan secara otonom untuk mengalokasikan DBH sawit yang diperoleh dari transfer pusat.

“Saya meminta pemerintah tidak perlu mengatur penggunaan DBH sawit yang dialokasikan kepada daerah. Biarkan pemerintah daerah menentukan sendiri ke mana DBH sawit tersebut dialokasikan. Saya kira pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan prioritas penggunaan di daerahnya masing-masing. Kontrol penggunaan anggaran DBH melalui proses pembahasan bersama kementerian justru akan menghambat realisasi DBH di daerah,” kata senator dari Bengkulu itu.

Alokasi Dana Bagi Hasil Sawit untuk Pemerintah Daerah

Dana bagi hasil (DBH) sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya. DBH sawit juga menjadi bagian dari transfer ke daerah (TKD).

Fagu DBH sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4% dari penerimaan negara. DBH sawit dibagikan kepada:

- Provinsi yang bersangkutan sebesar 20%;
- Kabupaten/kota penghasil sebesar 60%; dan
- Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20%.

Penentuan besaran perincian alokasi DBH sawit yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut:

- Luas lahan perkebunan sawit;
- Produktivitas lahan perkebunan sawit; dan/atau
- Indikator lainnya yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Alokasi DBH Sawit dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

- 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penerapan daerah penghasil; dan
- 10% berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

Catatan:
Kinerja pemerintah daerah yang menjadi dasar perhitungan DBH sawit merupakan kinerja dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan/atau kinerja lainnya.

DBH

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, yang akan menjadi landasan aturan untuk pencairan DBH sawit ke daerah. DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya. (*)

Anak Berkebutuhan Khusus di DIY Banyak Belum Nikmati Pendidikan

Jumlah anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekitar 7.500 orang. Sebagian besar dari mereka belum bisa menikmati pendidikan di Sekolah luar biasa (SLB) karena terkendala jarak. Jumlah SLB di DIY masih terbatas jumlahnya dan penyebarannya juga tidak merata.

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cholid Mahmud menekankan, penyandang disabilitas perlu difasilitasi dan diarahkan ke arah pemberdayaan sehingga bisa mandiri. Karena tidak sedikit pula dari mereka justru memiliki potensi dan prestasi yang menghasilkan karya besar di berbagai bidang. Mereka butuh fasilitas dan pendampingan sesuai minat dan bakat yang dimiliki.

“Seperti Putri Ariani yang penyanyi itu. Kan dia berprestasi bisa mengembangkan bakatnya dengan bernyanyi sampai ke tingkat internasional,” kata senator dari daerah pemilihan DIY itu, dalam rapat pengawasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Kelompok Disabilitas bersama instansi terkait, di Kantor DPD RI DIY, awal Agustus 2023.

Cholid mengakui penanganan difabel di DIY paling baik secara nasional. Pemerintah Provinsi DIY sudah memiliki peraturan daerah terkait difabel sejak 2012 lalu sehingga realisasi penanganan lebih tertata dengan baik. Hanya saja, jumlah SLB di DIY masih terbatas dan penyebarannya tidak merata.

Karena, banyak di antara mereka tidak bisa sekolah karena terkendala jarak. Dia mencontohkan di Kulon Progo dan Gunungkidul, jumlahnya sangat sedikit, padahal masing-masing kabupaten cukup luas wilayahnya.

“Karena jaraknya cukup jauh, orang tua tidak bisa mengantarkan anaknya ke SLB. Kalau mengantar ke sekolah, orang tua jadi tidak bekerja,” kata Cholid Mahmud.

Subkoordinator Bidang Kurikulum dan Pendidikan Khusus Disdikpora DIY Suryanto mengakui banyak anak berkebutuhan khusus tidak bisa sekolah di SLB karena kendala jarak yang cukup jauh. Selain itu, ada juga orang tua yang belum berkenan untuk menyekolahkan anaknya di SLB karena faktor tertentu. “Ada sekitar 1.200 anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah karena orang tua tidak bisa mengantar dan ada pula orang tua belum berkenan menyekolahkan anaknya di SLB,” jelasnya. (*)



Anggota Komite III DPD RI Cholid Mahmud. (Foto Dok Pribadi)

Status Desa Tertinggal Sudah tidak Relevan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Kholik mengusulkan agar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Desa dihapus kategori desa tertinggal karena sudah tidak relevan. Selama ini pemerintah mengategorikan atau membagi desa dengan kategori desa mandiri, maju, berkembang, dan tertinggal.

Menurutnya, masing-masing desa memiliki potensi yang bisa digali dan dikembangkan untuk kemajuan desa. Disamping itu, status desa tertinggal juga memberikan citra yang negatif dan stigma yang melekat terhadap warga desa setempat. “Pengategorian desa tersebut tidak tepat. kategori desa tertinggal sudah tidak relevan, cenderung merendahkan atau memberikan stigma yang buruk kepada warganya,” kata Abdul Kholik dikutip dari Tribunnews.com, awal Agustus 2023.

Dalam praktiknya, program desa tertinggal selama ini hanya menysasar pada subjek warganya, bukan bertujuan mendorong

potensi desa itu agar berkembang dan mengatasi kemiskinan. Selama ini cara mengatasi

kategori yang diusulkan, yakni desa pertanian, desa maritim, desa hutan, dan desa industri.

“Keempat kategori itu bila diterapkan maka yang didorong dalam UU Desa tersebut adalah pengembangan potensi desa. Tolok ukur keberhasilannya adalah bila itu desa pertanian, maka sektor pertaniannya yang maju. Demikian dengan desa maritim, desa hutan, dan desa industri.

Mereka dikategorikan desa yang maju bila sektor potensinya tersebut maju dan berkembang dengan baik,” ujarnya.

Dengan demikian, alokasi dana desa yang direncanakan akan ditingkatkan menjadi Rp2 miliar nantinya dapat difokuskan pada sektor potensi desa tersebut. Selain itu, di dalam struktur pemerintahan di desa akan disesuaikan dengan potensi tersebut. Misalnya nanti ada kepala urusan (kaur) pertanian, kaur maritim, kaur kehutanan, dan kaur industri di desa-desa tersebut. (*)



Anggota DPD RI dari Jawa Tengah Abdul Kholik.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kemiskinan di desa selama itu lebih berupa pemberian bantuan-bantuan. Bukan kepada memaksimalkan potensi desa agar berkembang dan mengangkat perekonomian warganya.

Karena itu, Abdul Kholik mengusulkan di RUU Desa dilakukan perubahan dalam kategorisasi desa. Dia mengusulkan pengategorian desa diganti berdasarkan pada potensi yang dimiliki desa. Ada empat



Berdiri Sejak Tahun 2012: Ibu Kota Kaltara Belum Daerah Otonom



Pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kota Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini belum terealisasi. Padahal, provinsi termuda di Kalimantan itu sudah berdiri tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012.



Anggota DPD RI Fernando Sinaga ketika memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan. (Foto Dok Pribadi)

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa ibu kota Kaltara adalah Kota Tanjung Selor, salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan. Namun, pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom masih terganjal oleh moratorium pembentukan DOB yang dilakukan pemerintah. Hingga kini, moratorium DOB tersebut belum dicabut pemerintah.

“Sangat miris, hingga kini Provinsi Kaltara yang sudah terbentuk sejak 25 Oktober 2012 tetapi belum mempunyai kota sebagai ibukotanya. Menurut saya DOB Kota Tanjung Selor ini sudah urgen dan mendesak untuk dibentuk mengingat megaproyek dan beberapa Proyek Strategis

Nasional (PSN) serta investasi semakin berjalan baik di Kaltara,” tegas anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fernando Sinaga kepada sejumlah wartawan, saat melakukan reses di Kaltara, awal Agustus 2023.

Fernando Sinaga meminta pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan yaitu mencabut moratorium DOB dan membentuk DOB secara terbatas di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang memang sudah urgen dan mendesak menjadi DOB, salah satunya adalah Kota Tanjung Selor.

Fernando menambahkan, urgensi dan ke-

menyebutkannya Kota untuk menopang pelayanan publik bagi pelaksanaan PSN dan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Kami bersama warga Kaltara sangat berharap pembentukan DOB Kota Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kaltara bisa menjadi prioritas utama pemerintahan baru terbentuk hasil Pemilu 2024. Sehingga pada awal 2025 DOB Kota Tanjung Selor dapat terealisasi,” harap Fernando Sinaga. (*)

Perpanjangan Masa Jabatan Kades Hambat Proses Regenerasi



Anggota DPD RI Abraham Liyanto (kanan) bersama Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul usai berbicara dalam FGD bertema "Arah Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa."
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abraham Liyanto menyatakan tidak setuju perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Jika ditambah menjadi sembilan tahun, dikuatirkannya praktik korupsi di desa-desa yang terjadi selama ini akan terus berlanjut.

Selain itu, diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari konstitusi. Pembatasan jabatan ini pun menjadi konsen Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, dia menginginkan kades masa jabatan kepala desa (kades) tetap enam tahun, sesuai dengan putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.

“Ikuti saja putusan MK. Putusan MK pasti sudah sesuai konstitusi. Karena tugas MK menguji setiap aturan agar sesuai konstitusi,” kata Abraham dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Arah Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa” di Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), akhir Juli 2023.

MK dalam putusannya menyebutkan, kades yang sudah menjabat satu periode, masih diberi kesempatan untuk menjabat dua periode berikutnya. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 39. Ayat 1 menyatakan kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sementara Ayat 2 menyatakan kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

“Sikap saya didasarkan pada pertimbangan MK. Dalam putusannya, MK menyorot pada dua aspek, yaitu regenerasi kepemimpinan danantisipasi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, ide perpanjangan masa jabatan kades menghambat proses regenerasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan,” kata anggota DPD RI dari Provinsi NTT itu. (*)



Anggota DPD RI di salah satu rumah di Kabupaten Aceh Tamiang, yang mendapat program Bantuan Aspirasi Rehab Rumah (BSPS). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Abdullah Puteh Serahkan Bantuan Aspirasi Rehab Rumah

Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdullah Puteh secara simbolis menyerahkan bantuan program rehabilitasi rumah bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, baru-baru ini. Program itu merupakan bagian dari Bantuan Aspirasi Rehab Rumah (BSPS) yang bertujuan untuk memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan dan terdampak bencana.

Pada momen tersebut, Abdullah Puteh berkomitmen untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Aceh Tamiang. Salah satunya melalui program

BSPS yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial dan dukungan sosial bagi warga yang kesulitan memperbaiki atau merehabilitasi rumah masyarakat.

“Program BSPS ini lahir sebagai respons atas situasi sosial dan ekonomi yang mengkhawatirkan di wilayah Aceh Tamiang, khususnya bagi mereka yang terdampak bencana alam dan kurang beruntung. Program BSPS ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, namun juga mementingkan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat,” kata Abdullah Puteh.

Program BSPS diharapkan

nya dapat memotivasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, dia mengajak antara pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergis untuk menciptakan perubahan positif di wilayah setempat.

“Pentingnya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Program ini membutuhkan dukungan kolektif dalam bentuk kontribusi finansial, sumber daya manusia, dan semangat gotong royong,” kata senator dari daerah pemilihan Provinsi Aceh tersebut. (*)

Akhiri Masa Sidang 2022-2023 Alkel DPP RI Laporkan Kinerja

De w a n Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan Agustus 2023. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin itu, menutup Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023.

Mengakhiri Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, masing-masing alat kelengkapan (alkel) DPD RI melaporkan hasil kinerja atau pelaksanaan tugas konstitusionalnya selama satu tahun terakhir, baik itu di bidang legislasi maupun bidang pengawasan.

Dari laporan alkel tersebut, ada dua keputusan tentang Program Legislasi (Prolegnas) DPD RI, tujuh RUU usul inisiatif, enam pandangan DPD RI ter-



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin menerima laporan kinerja Komite I DPD RI yang diserahkan Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

hadap RUU tertentu, tiga pertimbangan DPD RI terhadap RUU, tiga pertimbangan DPD RI non-RUU, 22 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, dua Rekomendasi DPD RI, dan dua hasil pemantauan dan evaluasi raperda dan perda.

“Kami berharap

agar laporan pelaksanaan tugas ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Tahun Sidang 2023-2024 serta sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga DPD RI,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin pada paripurna tersebut.

Selain penyampaian laporan kinerja oleh masing-masing alat kelengkapan, sidang paripurna tersebut juga diisi dengan menyampaikan laporan penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPD RI di daerah pemilihannya masing-masing. (*)



Senator Soroti Sistem Zonasi PPDB

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah. Karena dengan sistem zonasi tersebut banyak menimbulkan masalah di daerah, dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak, adil dan merata.





Suasana Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 DPD RI, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembukaan sidang. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Setidaknya sorotan itu disampaikan oleh anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan (Sulsel) Lily Amelia Salurapa, dalam Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada pertengahan Agustus 2023.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin itu, beberapa anggota DPD RI menyampaikan laporan penyerapan aspirasi di daerah pilihannya masing-masing. Diantaranya Senator Lily Amelia Salurapa.

“Fakta menunjukkan bahwa sistem zonasi ini menyulitkan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak, adil dan merata,” kata Lily sembari meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengevaluasi dan meninjau kembali penerapan sistem zonasi tersebut.

Sedangkan anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah M Rakhman berharap Kementerian PUPR bisa memperhatikan jalan utama di dapilnya karena mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi dan melambatnya perekonomian.

Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan menyampaikan intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banjir di beberapa tempat di daerah Sulawesi Tenggara sehingga ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Belum lagi, minimnya air bersih juga menjadi kendala saat ini yang tengah dihadapi.

Kemudian anggota DPD RI asal Kalimantan Utara (Kaltara) Fernando Sinaga menyampaikan 6 isu strategis yang dihimpun dari aspirasi unsur warga dan pemerintahan daerah di Kaltara. Salah satunya aspirasi soal pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara. (*)



Sidang Paripurna DPD RI Apresiasi Kinerja Setjen



Pimpinan dan anggota DPD RI usai menggelar Sidang Paripurna ke-I Masa Sidang I Tahun 2023-2024. Sidang paripurna tersebut menyampaikan apresiasi atas kinerja Setjen DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI yang berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak 17 kali berturut-turut, serta meraih berbagai penghargaan selama tahun 2022 dan 2023.

Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti ketika memimpin Sidang Paripurna ke-I DPD RI Masa Sidang I Tahun 2023-2024, pada pertengahan Agustus 2023 menilai Setjen DPD RI sebagai *supporting system* telah melaksanakan dukungan

dengan baik dan akuntabel. Hal itu dibuktikan dengan Setjen telah berhasil mempertahankan predikat WTP dari BPK RI sebanyak 17 kali secara berturut-turut.

Selain itu, Setjen DPD RI juga mendapatkan sejumlah penghargaan, seperti penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik peringkat I tahun 2022, penilaian IKPA terbaik peringkat II tahun 2023, pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum terbaik ke-4 tingkat lembaga negara tahun 2022.

Kemudian piagam penghargaan Reksa Bandha 2022 dengan kategori peningka-

tan tata kelola berkelanjutan, penghargaan dari BSSN atas pencapaian tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber, dan penghargaan BKN Award tahun 2023 dalam kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian.

“Dari meja pimpinan atas nama seluruh anggota DPD RI mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal DPD RI atas kerja keras dan dedikasinya dalam memberikan dukungan kepada lembaga dengan penuh tanggung jawab,” kata LaNyalla didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin. (*)

Dikocok Ulang Pimpinan dan Anggota Alkel DPD RI



Para Pimpinan DPD RI saat memimpin Sidang Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024, pertengahan Agustus 2023. Salah satu agenda sidang adalah mengesahkan anggota alat kelengkapan DPD RI tahun sidang 2023-2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Memasuki tahun sidang 2023-2024, pimpinan dan anggota alat kelengkapan (alkel) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dikocok ulang. Keanggotaan masing-masing alkel disahkan dalam Sidang Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024, pertengahan Agustus 2023, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kocok ulang atau pergantian pimpinan dan anggota alkel DPD RI rutin dilakukan setiap tahun berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Pimpinan alkel yang dikocok ulang, yaitu Komite I sampai IV, Panitia Perancang Undang-Undang

(PPUU), Badan Akuntabilitas Publik (BAP), Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP).

Pergantian pimpinan dan anggota alkel itu juga berlaku di Kelompok DPD RI di MPR RI. Namun, khusus untuk Pimpinan Panitia Musyawarah (Panmus), tidak dilakukan kocok ulang karena pimpinnya sudah diisi oleh Pimpinan DPD RI.

Pemilihan pimpinan alat kelengkapan berdasarkan Pasal 128 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Pemilihan akan didahului dengan

rapat sub wilayah dalam menentukan calon pimpinan dari masing-masing sub wilayah, yaitu didasari oleh keterwakilan sub wilayah dan dipilih melalui rapat pleno.

Khusus pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan, dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam Pasal 98 ayat (4) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Pimpinan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan yang terdiri atas Gugus Sumatera satu orang, Gugus Jawa satu orang, Gugus Kalimantan dan Sulawesi satu orang, dan Gugus Maluku, Papua, Nusa Tenggara dan Bali satu orang. (*)



Nono Terima Delegasi Dewan Federasi Rusia Bahas Kerja Sama Antara Kedua Negara



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ketika menerima audiensi Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia Andrey Denisov. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono menerima audiensi Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia Andrey Denisov, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, awal Agustus 2023. Pada kesempatan itu Nono mendorong terbangunnya kerja sama bilateral antara kedua negara, salah satunya di bidang penyediaan energi dan antariksa.

Nono menjelaskan bahwa dalam kunjungan DPD RI ke Rusia beberapa waktu lalu, selain membahas peningkatan investasi di daerah, salah satu wacana kemitraan strategis yang akan dilakukan antara

Indonesia dengan Rusia adalah di bidang antariksa dan penyediaan energi melalui tenaga nuklir. Selain itu, Nono juga mendorong adanya kerjasama penyediaan beasiswa bagi pelajar Indonesia yang akan menempuh pendidikan di Rusia.

“Sekarang Rusia mengembangkan tenaga listrik berbasis nuklir dengan sistem floating berkapasitas 100-110 Megawatt yang cocok untuk pulau-pulau sedang, khususnya di kawasan timur Indonesia. Itu yang menjadi salah satu fokus pembicaraan sebelumnya, termasuk kerja sama antariksa,” ucapnya.

Andrey Denisov menyambut baik wacana peningkatan kerja sama kedua negara. Apa-

lagi beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Rusia sebagai bentuk jalinan kerja sama yang kuat antar kedua negara. Andrey berharap peningkatan kerja sama dapat diperluas di bidang bahan baku, penyediaan energi listrik, dan pengadaan pupuk.

“Kami juga bersedia dalam pembuatan infrastruktur untuk ibu kota Indonesia yang baru. Kami siap untuk berkomunikasi dalam menjalin peningkatan kerja sama kedua negara,” kata Andrey yang didampingi oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dan Anggota Komite Keuangan dan Pasar Keuangan Dewan Federasi Rusia Tatiana Sakharova. (*)



BKSP Wants to Delve into the French Bicameral System

Chairman of BKSP DPD of Indonesia, Sylviana Murni, presents a souvenir to the French Ambassador to Indonesia, Fabian Fenone. (Photo by Biro PHM Setjen DPD RI)

The Parliamentary Cooperation Body (BKSP) of the Regional Representative Council (DPD) of Indonesia is pushing for an enhancement of bilateral cooperation with the French Parliament. This collaboration is primarily aimed at an exchange of views on the bicameral (two-chambered) system as both nations possess bodies representing regional aspirations.

Although both countries have bodies representing regions, their powers differ significantly. The authority of the DPD of Indonesia is much more limited compared to the French Senate. The system in France is better established and has been in place for longer, ensuring effective checks and balances. The French Senate and its National Assembly jointly create, approve, and oversee laws. If no consensus is reached, a review is conducted.

“Even though there’s a commonality in championing regional aspirations, the fact is the role of DPD of Indonesia is not like that of the French Senate. Therefore, there’s a need for cooperation with the French Parliament to establish checks and balances,” said the Chair-

man of BKSP DPD of Indonesia, Sylviana Murni, during a meeting with the French Ambassador to Indonesia, Fabian Fenone, at the French Ambassador’s residence in early August 2023.

Sylviana, accompanied by DPD members Fadel Muhammad, Abraham Liyanto, and Darmansyah Husein, acknowledges that the DPD of Indonesia is relatively young, being born from the third amendment of the 1945 Constitution in 1999. Thus, the DPD wishes to learn from the French Senate about representing regional interests and aspirations, such as budgets, development programs, and regional autonomy. They also want to understand the position and authority of the French Senate in legislation.

“In French law, it is stated that the Senate represents the government and the regions. Meanwhile, the French Senate and National Assembly jointly create, approve, and oversee laws. The creation and approval of laws must involve both the Senate and the National Assembly. If no consensus is reached, a review is conducted,” said the French Ambassador to Indonesia, Fabian Fenone. (*)



Paripurna DPD RI Sahkan Pimpinan Alkel 2023-2024

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi rekan sejawatnya Mahyudin dan Sultan B Najamudin menyetujui palu pengesahan pimpinan Alkel DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun Sidang 2023-2024 disahkan dalam Sidang Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada akhir Agustus 2023.

Dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh tiga Wakil Ketua DPD RI, yaitu Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin tersebut, juga menetapkan Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI dan keanggotaan Panitia Musyawarah DPD RI.

Dengan ditetapkannya komposisi pimpinan masing-masing alkel, Pimpinan DPD RI mengharapkan kinerja alkel dapat lebih dioptimalkan, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional sebagai representasi daerah. “Kami ucapkan selamat bertugas, tetap semangat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdikan untuk daerah,” kata Nono Sampono.

Pemilihan pimpinan Alkel DPD RI Masa Sidang Tahun 2023-2024 itu sendiri, dilaku-

kan sehari sebelumnya melalui rapat-rapat pleno di masing-masing alat kelengkapan. Pemilihan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPD RI.

Mereka yang dipilih terlebih dahulu melalui rapat sub wilayah masing-masing, yaitu Sub Wilayah Barat I, Barat II, Timur I, dan Timur II. Selanjutnya, untuk komposisi pimpinan masing-masing alkel terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua, yang mencerminkan keseimbangan wilayah yaitu Sub Wilayah Barat I, Sub Wilayah Barat II, Sub Wilayah Timur I dan Sub Wilayah Timur II.

Khusus untuk alkel Panitia Musyawarah (Panmus), pimpinannya tidak dilakukan pemilihan. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, bahwa Pimpinan DPD RI karena jabatannya, menjadi Pimpinan Panitia Musyawarah. Keanggotaan Panmus terdiri dari ketua alkel dan satu anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai ketua alkel. (*)

Mereka yang Bertahan Duduki Kursi Ketua Alkel



Pimpinan Alkel DPD RI Tahun 2023-2024 bersama Pimpinan DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 22 Agustus 2023, telah mengesahkan pimpinan masing-masing alat kelengkapan (alkel) Masa Sidang Tahun 2023-2024.

Dari pimpinan alat kelengkapan yang diumumkan dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin tersebut, ada di antara mereka yang bertahan menduduki kursi ketua alkel. Kemudian ada pula yang sebelumnya “istirahat” di kursi pimpinan alkel, kini kembali

menjadi ketua di alkel yang sama.

Mereka yang bertahan menduduki kursi ketua alkel yang sama dengan tahun sebelumnya adalah Yorrys Raweyai. Senator dari Provinsi Papua ini tetap bertahan sebagai Ketua Komite II. Kemudian Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, juga tetap dipercaya menjadi Ketua Badan Kehormatan (BK). Begitu juga dengan Stefanus BAN Liow, dia tetap menjadi Ketua BULD dan Hasan Basri sebagai Ketua Komite III.

Sementara itu, senator dari Aceh Fachrul Razi yang pernah menjadi Ketua Komite I pada Masa Sidang Tahun 2021-

2022, kini kembali dipercaya untuk menduduki kursi Ketua Komite I. Ada pula di antara pimpinan alkel tahun lalu pindah ke alkel lain. Seperti Sylviana Murni dari Ketua BKSP menjadi Wakil Ketua Komite I.

Pemilihan pimpinan Akel DPD RI Masa Sidang Tahun 2023-2024 itu sendiri, dilakukan sehari sebelumnya melalui rapat-rapat pleno di masing-masing alat kelengkapan. Pemilihan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPD RI. (*)



Pimpinan Alkel DPD RI Tahun 2023-2024

Komite I

- Ketua Fachrul Razi
- Wakil Ketua I Sylviana Murni
- Wakil Ketua II Filep Wamafma
- Wakil Ketua III Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim

Badan Kehormatan (BK)

- Ketua Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa
- Wakil Ketua Habib Ali Alwi
- Wakil Ketua II Marthin Billa
- Wakil Ketua III I Made Mangku Pastika

Komite II

- Ketua Yorrys Raweyai
- Wakil Ketua I Abdullah Puteh
- Wakil Ketua II Bustami Zainudin
- Wakil Ketua III dan Aji Mirni Mawarni

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP)

- Ketua Darmansyah Husein
- Wakil Ketua I Gusti Farid Hasan A
- Wakil Ketua II Dailami Firdaus
- Wakil Ketua III Maya Rumantir

Komite III DPD RI

- Ketua Hasan Basri
- Wakil Ketua I Mirati Dewaningsih
- Wakil Ketua II Muslim M Yatim
- Wakil Ketua III Abdul Hakim

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)

- Ketua Stefanus BAN Liow
- Wakil Ketua Eni Sumarni
- Wakil Ketua II Lily Amelia Salurapa
- Wakil Ketua III Alirman Sori

Komite IV DPD RI

- Ketua Amang Syafrudin
- Wakil Ketua I Elviana
- Wakil Ketua II Novita Anakotta
- Wakil Ketua III Fernando Sinaga

Badan Akuntabilitas Publik (BAP)

- Ketua Tamsil Linrung
- Wakil Ketua I Evi Apita Maya
- Wakil Ketua II Muhammad Nuh
- Wakil Ketua III Bambang Santoso

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

- Ketua Dedi Iskandar Batubara
- Wakil Ketua I Muhammad Anfan Hadikusumo
- Wakil Ketua II Ajiep Padindang
- Wakil Ketua III Asyera Respati A Wundalero

Kelompok DPD RI di MPR RI

- Ketua M Syukur
- Sekretaris Ajbar
- Bendahara Anna Latucon

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

- Ketua Ahmad Nawardi
- Wakil Ketua I Sudirman
- Wakil Ketua II Andri Prayoga Putra Singkaru
- Wakil Ketua III Matheus Stefi Pasimanjeku

LKPASI Minta DPD RI Perjuangkan Hak Ulayat Kerajaan dan Masyarakat Adat



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima LKPASI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI), yang merupakan kumpulan para raja, sultan dan pemangku adat, mendatangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI awal Agustus 2023. Mereka diterima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Rapat Pajajaran Gedung B, Komplek Parlemen Senayan Jakarta.

Mereka meminta DPD RI mendorong pemerintah agar serius merealisasikan hak pengelolaan tanah ulayat milik kerajaan dan masyarakat hukum adat. Karena, Presiden Jokowi saat bertemu dengan para raja dan para sultan, pada tahun 2018 pernah mengatakan bahwa hak-hak raja, sultan dan pemangku adat terkait pe-

ngelolaan tanah ulayatnya akan diakomodir oleh pemerintah.

Ketua Umum LKPASI Sultan Rusdhal Inayatshah dari Kesultanan Inderapura, Sumatera Barat menyebutkan, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 yang membuka ruang tanah swapraja dikembalikan kepada penerus swapraja dengan syarat dikelola sendiri.

“Syaratnya saat itu adalah data-datanya sudah dipersiapkan. Namun hingga saat ini hak tersebut belum juga dilaksanakan. Karena kami LKPASI meminta kepastian dari proses sebelumnya. Kami para raja, sultan, dan seluruh masyarakat hukum adat ini hanya ingin meminta kembali hak kami,” papar Sultan Rusdhal Inayatshah.

Mereka berpandangan, seharusnya aset yang dimiliki oleh para raja dan sultan dapat dihargai oleh negara, seperti yang terjadi di Yogyakarta. Mengapa hanya Yogyakarta yang dihargai hak ulayatnya setelah penyerahan kedaulatan kepada negara. Sedangkan hak ulayat mereka semua hilang begitu saja.

Menanggapi aspirasi LKPASI itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan pihaknya selalu terdepan dalam memperjuangkan tuntutan para Raja dan Sultan Nusantara. DPD RI terus memperjuangkan agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU tentang Perlindungan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara menjadi undang-undang,” kata LaNyalla. (*)

Terima Mahasiswa UMP Mahyu Jelaskan Sejarah Berdiri DPD RI



Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) SetjenDPD RI Mahyu Darma bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Kepala
Biro
Protokol,

Humas dan Media (PHM) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyu Darma didampingi Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan Heru Firdan, menerima kunjungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, akhir Juli 2023.

Kepada mahasiswa UMP itu, Mahyu Darma menjelaskan latar belakang berdirinya DPD RI. Berawal dari tuntutan reformasi yang menginginkan agar pembangunan ekonomi merata di seluruh daerah. Seiring dengan itu, dilakukan amendemen ketiga UUD 1945 yang melahirkan DPD RI. “Sebenarnya perwakilan daerah itu sudah ada di parlemen, yaitu Utusan Daerah di MPR RI. Hanya saja belum optimal,” jelas Mahyu.

Dengan lahirnya DPD RI, maka ada dua lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia atau lebih dikenal dengan parlemen dua

kamar atau

bikameral yaitu DPR RI dan DPD RI. Anggota DPR RI dari unsur partai politik, sementara anggota DPD RI unsur perorangan dari daerah.

Anggota DPD RI juga dipilih dalam pemilu, sama dengan DPR RI. Hanya saja, untuk duduk menjadi anggota DPD RI sangat sulit ketimbang anggota DPR RI. Calon anggota DPD RI harus bekerja sendiri turun ke seluruh kabupaten/kota di provinsi tempat mencalonkan diri tanpa di bantu oleh partai politik. Sedangkan calon anggota DPR RI hanya sebatas daerah pemilihannya dan didukung mesin partai. “Makanya kebanyakan yang duduk di DPD RI para tokoh-tokoh masyarakat,” jelas Mahyu.

Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMP M Saleh Idrus menjelaskan tujuan kedatangan ke DPD RI, yaitu ingin mengetahui lebih mendalam mengenai lembaga negara. Hal itu merupakan mata kuliah khusus seperti hukum lembaga negara. Mereka menginginkan bukan sekedar teori saja, tapi melihat kondisi yang ada di lapangan. (*)

Rayakan HUT Ke-4 DWP Setjen DPD RI Santuni Anak Yatim



Penasehat DWP Setjen DPD RI Enny Ratnawati LaNyalla didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Ketua DWP Setjen DPD RI Zuliana Rahman Hadi memotong tumpeng ulang tahun DWP Setjen DPD RI ke-4. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam rangkaian kegiatan ulang tahunnya yang ke-4, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar seminar kesehatan bertajuk “Cintai Dirimu, Cintai Kesehatan Reproduksi” dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim di lingkungan Setjen DPD RI.

Ketua Umum DWP Setjen DPD RI Zuliana Rahman Hadi saat membuka seminar kesehatan itu, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, pada akhir Juli 2023 mengharapkan agar seminar yang digelar tersebut bermanfaat bagi kaum perempuan. “Kita juga memberikan santunan kepada

anak-anak yatim di lingkungan Setjen DPD RI sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita,” kata Zuliana.

Penasehat DWP Setjen DPD RI Enny Ratnawati LaNyalla Mahmud Mattalitti yang juga hadir pada acara tersebut, mengapresiasi gelaran kegiatan yang dilakukan DWP Setjen DPD RI. “Selamat ulang tahun ke empat, semoga DWP Setjen DPD RI semakin memberikan kontribusi positif bagi anggota, keluarga dan masyarakat sekitar,” ucap Enny LaNyalla.

Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi pada ke-

sempatan tersebut mengatakan, meski DWP Setjen DPD RI baru berusia 4 tahun, namun sudah memberikan warna bagi keberadaan kegiatan ekstra yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. “Kami mendukung sepenuhnya dan mengapresiasi kegiatan-kegiatan sosial dan kontribusi nyatanya yang dilakukan DWP Setjen DPD RI selama ini,” kata Rahman Hadi.

Acara ditutup dengan melakukan pemotongan tumpeng bersama yang dihadiri juga oleh Deputy Administrasi Lalu Niqman Zahir, Plt. Deputy Persidangan Mesranian, dan pejabat di lingkungan Setjen DPD RI. (*)



Pentingnya Pembatasan Kekuasaan Kepala Desa

Oleh:

Oleh Khusni Tamrin, S.Sos.*

Analisis Legislatif Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Beberapa waktu lalu kepala desa seluruh Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung DPR. Mereka menuntut perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Tuntutan itu direspons positif oleh pemerintah dan DPR. Bahkan, Badan Legislasi dan sebagian anggota fraksi partai politik di DPR mengusulkan agar revisi Undang-Undang (UU) Desa menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023. Hal ini telah memantik pro dan kontra.

Presiden Jokowi merespons desakan itu dan mengaku tidak permasalahan setiap aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal itu bisa disampaikan ke DPR. Para kepala desa yang tergabung dalam Papedesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) sebelumnya ramai-ramai datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode. Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (CNNIndonesia.com,

24/1/2023).

Pro dan Kontra Masa Jabatan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar-dasar terkait tata kelola dalam pemerintahan Desa, salah satunya masa jabatan Kepala Desa. Pasal 39 UU Desa telah diatur bahwa masa jabatan kepala Desa adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat menjabat selama tiga periode. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang menjelaskan lebih lanjut batasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa. Sebaliknya, kondisi serupa masih memantik pertentangan hingga dikurangi atau bahkan lebih diperpendek lagi masa jabatan. Hal ini juga terlihat dalam permohonan *judicial review* di MK yang teregistrasi dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang menjelaskan tidak simetris dengan kondisi demokrasi (mkri.di, 15/2/2023).

M a s a jabatan hingga 6 tahun dengan 3 periode, jika dijumlahkan menjadi 18 tahun



merupakan masa jabatan yang terlampau panjang dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari *excessive* atau *abuse of power*. Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa yang rasional sesuai dengan UUD 1945. Apabila tetap bertahan pada pengaturan Pasal 39 UU Desa maka akan membuka ruang *abuse of power* yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional (mkri.id, 15/2/2023).

Problem Kekuasaan Kepala Desa

Kuat dan panjangnya kekuasaan kepala desa setidaknya menyisakan beberapa permasalahan yang cukup krusial. Hal ini terlihat dari akses negatif dari adanya kekuasaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Hal ini terlihat dari salah satu bentuk arogansi yang dilakukan oleh kepala desa adalah dalam proses pengangkatan perangkat desa. Kepala desa seringkali mengangkat perangkat desa yang memiliki hubungan politis, kekeluargaan, maupun hubungan kekerabatan dengan kepala desa. Dalam hal kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di tingkat desa, hingga tahun 2022 terdapat 686 kades yang terjerat korupsi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan rentang masa jabatan yang saat ini berlaku sepanjang 6 tahun sudah tercipta perilaku koruptif, dan potensinya akan semakin tinggi

jika masa jabatan diperpanjang (pshk.or.id, 24/1/2023).

Kondisi ini menggambarkan adanya situasi yang justru melanggengkan panjangnya kekuasaan yang absolut dan tidak terkontrol, setali tiga uang dengan pandangan bahwa semakin berkuasa seseorang, maka berpotensi semakin korup.

Urgensi Pembatasan Masa Jabatan

Beberapa hal yang patut untuk disimpulkan adalah: *Pertama*, tuntutan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah hal yang harus diantisipasi karena justru memberikan ruang penyalahgunaan kekuasaan yang besar. *Kedua*, panjangnya masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan demokrasi.

Oleh karena itu, diperlukan model dan konsep konstitusionalisme dan pentingnya pembatasan kekuasaan. Hal ini akan berdampak pada langkah preventif agar penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi dalam berbagai aspek yang bersumber kepada kekuasaan kepala desa.

Alih-alih mengakomodasi kepentingan politik yang besar dari kepala desa, Pemerintah dan DPR justru harus kembali memperhitungkan dampak tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan justru mendorong adanya revisi yang lebih membatasi kekuasaan masa jabatan tersebut. (*)





Resep Anti Negara Gagal

Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ketua DPD RI

Minggu lalu, mata dunia tertuju kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Karena dia menyampaikan peringatan serius kepada negara-negara di dunia. Tentang ancaman negara gagal.

Dalam laporannya yang berjudul; *A World of Debt* (Dunia Utang), Guterres memberi peringatan serius terkait utang publik global di tahun 2022, yang mencetak rekor 92 triliun US Dolar. Angka tertinggi sepanjang masa.

Sekjen kelahiran Portugal itu mengatakan, sebanyak 52 negara, hampir 40 persennya adalah negara berkembang, berada dalam masalah utang yang serius. Katanya seperti dirilis di website resmi United Nation, Rabu, 12 Juli 2023.

Yang menjadi perhatian dia, adalah tingginya angka pembayaran bunga utang (belum termasuk pokok utang), yang melebihi beberapa belanja publik pemerintah di sektor yang seharusnya menjadi *mandatory* (kewajiban). Sektor *mandatory* menurut Guterres yang terpenting ada dua; Kesehatan dan Pendidikan.

Beberapa negara memang tercatat membayar bunga utang lebih tinggi ketimbang belanja sektor *mandatory*. Terutama negara-negara di Benua Afrika. Menurut dia, jika ini diteruskan, potensi untuk menjadi negara gagal terbuka lebar.

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam APBN kita, bunga utang yang dibayar pemerintah di tahun 2022 sebesar Rp 386,3 triliun. Sementara anggaran Kesehatan di tahun 2022 sebesar Rp 176,7 triliun. Se-

dangkan belanja di sektor Pendidikan mencapai Rp 472,6 triliun.

Di sisi lain, potensi angka utang Indonesia masih akan membesar. Pertama karena defisit neraca APBN. Kedua, karena pagu rasio utang dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, masih terbuka untuk menambah utang.

Rasio utang Indonesia tahun 2023 masih di angka 38,15 persen dari PDB. Sedangkan pagu di dalam UU 17/2023 tersebut dipatok 60 persen dari PDB. Artinya masih berpotensi untuk menambah utang berkali-kali lipat.

Dan jika betul nambah terus, maka belanja bayar bunga utang niscaya akan melampaui belanja sektor Pendidikan. Bahkan bisa saja melampaui gabungan antara belanja Pendidikan dan Kesehatan. Artinya, Indonesia juga berpotensi menjadi negara gagal. Dan k i t a



AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ketua DPD RI
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



tidak perlu *defense*, atau malu-malu mendiskusikan soal ini.

Pemerintah tidak perlu nyolot dan mengelak dengan membandingkan dengan rasio utang Jepang yang mencapai 260 persen dari PDB. Karena kita harus utuh menjelaskan informasi tersebut.

Karena Jepang ternyata juga kreditur besar ke beberapa negara. Bahkan Jepang memegang surat utang Amerika Serikat sebesar 1,3 triliun USD atau sekitar 18.500 triliun rupiah. Sementara utang Jepang didominasi utang dalam negeri, dalam satuan mata uang Yen. Bukan USD.

Amerika Serikat sendiri juga utangnya tinggi. Mencapai rasio 137 persen dari PDB. Tetapi lagi-lagi, AS juga kreditur besar ke sejumlah negara. Apalagi AS ditopang oleh jaminan pemasukan pajak dari puluhan *the biggest company in the world*, yang berkantor pusat di AS. Jadi ojek dibandingkan.

Nah, daripada sibuk membuat perbandingan yang tidak *apple to apple*, lebih baik kita merefleksikan diri. Muhasabah. Untuk mencari resep jitu agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Karena negara ini milik rakyat. Pemerintah boleh *shutdown*. Tapi negara tidak boleh.

Pentingnya Sistem

Mari kita menilik buku tentang Negara Gagal yang ditulis ekonom asal Turki-Amerika, Daron Acemoglu dari Institut Teknologi Massachusetts dan ilmuwan politik James A. Robinson dari Universitas Harvard. Buku ini pertama kali dicetak tahun 2012 silam.

Mereka mengatakan kemajuan atau kemunduran suatu negara, ditentukan oleh desain institusi politik dan ekonominya. Suatu negara dapat terus berjalan dan mencapai titik kemakmuran, bila dikelola dengan cara yang tepat.

Ini artinya sistem. Bukan tergantung orang (pemimpin). Bahkan mereka mengatakan, meskipun negara kaya sumber daya alam, dan

ditopang iklim yang mendukung, (seperti Indonesia), bisa saja menjadi negara gagal. Apabila tidak dijalankan dengan sistem yang tepat.

Kedua akademisi itu memisahkan institusi politik dan ekonomi ke dalam dua bentuk. Yaitu; institusi politik ekonomi inklusif, dan institusi politik ekonomi ekstraktif. Intinya, institusi politik ekonomi inklusif ini memiliki kebijakan yang tidak hanya memberi keuntungan kepada kaum elit. Tapi juga memberi kemakmuran kepada rakyat mayoritas. Secara politik, rakyat juga bisa berpartisipasi aktif. Punya saluran konstitusional. Sehingga bisa mengontrol tindakan penguasa.

Sebaliknya, institusi politik ekonomi ekstraktif merupakan wujud kekuasaan di mana sumber daya ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), yang didukung oleh kekuatan politik dan kekuasaan. Situasi ini akan memicu kesenjangan ekonomi yang lebar.

Indonesia, sejak era reformasi, menempatkan partai politik dan presiden terpilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Namun, kesenjangan sosial tampak nyata dengan 1% penduduk menguasai setengah kekayaan nasional dan 58% sumber daya agraria. Ketidakadilan ini tidak hanya terasa dalam angka, tetapi juga dalam kenyataan sehari-hari di kampung-kampung, daerah-daerah, dan pulau-pulau kecil luar Jawa.

Kontestasi politik saat ini cenderung transaksional, dengan popularitas menjadi batu uji utama untuk mencari pemimpin nasional. Pilpres Langsung yang diadopsi tanpa adaptasi telah memperkenalkan politik kosmetik yang merusak kohesi bangsa. Elektabilitas yang dibingkai lembaga survei dan narasi di media sosial memperlihatkan realitas yang terkadang terdistorsi.

Sebagai bangsa, kita harus membangun kesadaran kolektif untuk mengembalikan Indonesia ke prinsip-prinsip aslinya seperti yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Penting untuk kembali memegang teguh Pancasila, khususnya sila keempat dan ketiga, agar Republik ini benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya segelintir individu atau kelompok. (*)



EMPAT DESTINASI JATENG YANG MENARIK

1. Candi Borobudur

Candi Borobudur ini adalah sebuah tempat wisata di jogja yang wajib banget kamu kunjungi, salah satu situs warisan dunia yang pernah di akui oleh UNESCO ini menjadi salah satu tempat wisata tujuan para turis mancanegara. Tempat Wisata Jogja yang merupakan sebuah candi budha terbesar di dunia ini pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia yang hingga kini masih terjaga dengan baik dan masih terlihat kokoh. Selain itu dari puncak Candi Borobudur ini kamu dapat menikmati pemandangan alam Jogja yang eksotis. (Fahima).



Foto Candi Borobudur – Magelang Jawa Tengah

2. Dataran Tinggi Dieng



Dataran Tinggi Dieng merupakan sebuah kota yang memiliki berbagai kawasan wisata dieng serta peninggalan sejarah yang masih terjaga dengan apik hingga saat ini. Banyak sekali destinasi objek wisata di dieng yang dapat kamu kunjungi, dari mulai telaga, candi, pegunungan, kawah, sampai dengan danau ada di tempat ini. Lokasi destinasi wisata Dieng juga tidak terlampaui jauh. Berbagai tempat seru yang menarik ini saling berdekatan dan ini lah yang menjadi daya tarik tersendiri dari kawasan wisata dataran tinggi Dieng.

3. Air Terjun Grojogan Sewu Tawangmangu

Air Terjun Grojogan Sewu merupakan air terjun tertinggi di Solo yang terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Air terjun dengan tinggi sekitar 80 meter ini sangat indah lantaran dikelilingi pepohonan rindang. Airnya jernih, dingin, dan menyegarkan. Udaranya pun sejuk sehingga membuat tubuh yang lelah kembali bugar. Di dalam kawasan ini terdapat sejumlah wahana permainan yang seru. Sangat cocok bagi Anda yang ingin relaksasi dan menikmati waktu bersama keluarga atau pasangan. (traveloka)



4. Semarang Zoo

Semarang Zoo merupakan destinasi wisata yang tepat untuk Anda mengenalkan ragam satwa kepada anak-anak. Tempat wisata Semarang ini menjadi rumah bagi sekitar 280 koleksi satwa mulai dari jenis burung, mamalia, primata, hingga ikan. Anda juga bisa berkunjung ke Museum Satwa yang menjadi rumah dari koleksi satwa yang telah diawetkan seperti macan tutul hingga elang. Makin lengkap, Semarang Zoo juga dilengkapi dengan wahana permainan seperti flying fox dan mini waterboom. (machfudfood)



Empat Kuliner Enak DARI RIAU

1 Mi Lendir

M a k a n a n khas Riau ini mungkin sedikit aneh di telinga. Jangan salah, meski namanya cukup unik, namun rasa dari mi lendir ini sudah pasti tidak bisa diragukan lagi kenikmatannya. Tapi apa sebenarnya mi lendir ini? Mi lendir dibuat dari mi kuning dan toge. Kemudian mi tersebut akan disiram dengan kuah kacang dicampur ubi dan rempah. Memang, umumnya mi ini sama dengan mi jenis lainnya. Yang berbeda memang terletak pada kuah mi ini yang sangat kental hingga menyerupai lendir. (Liputan6.com)



Foto: kompas.com

3 Lakse Kuah

Sekilas, lakse kuah m e m a n g mirip mi pada umumnya, namun kuahnya terbuat dari campuran ketumbar, adas manis, serta aneka rempah lainnya. Kendati menyerupai mi, bahan dasar lakse kuah dibuat dari tepung sagu. Makanan khas Riau ini juga nikmat jika dimakan dengan olahan ikan laut segar, ikan tongkol, maupun ikan teri yang ditumbuk halus. (Liputan6.com)



Foto: GenPI.co

4 Gulai Ikan Patin

Selanjutnya, salah satu makanan khas Riau yang terkenal adalah gulai ikan patin. Makanan Khas Riau ini tepatnya berasal dari Pekanbaru, Riau. Gulai ikan patin biasanya dinikmati dengan nasi hangat, serta pucuk daun ubi rebus. Salah satu yang menjadi ciri khas dari gulai ini adalah potongan ikan patin yang disiram dengan kuahnya yang kuning. Cita rasa pedas manis pada kuah serta kenyal dan gurihnya ikan patin membuat masakan ini banyak diburu wisatawan saat berkunjung ke Riau. (Liputan6.com)



foto: Ceceeromed Kitchen

2 Gulai Belacan

Gulai Belacan adalah makanan khas Riau yang wajib disantap saat berkunjung ke Riau. Belacan adalah nama lain dari terasi yang begitu dikenal oleh orang Sumatera. Makanan khas Riau ini dibuat dari kuah yang dicampur dengan terasi. Kemudian terdapat juga daging, udang, atau ikan. (Liputan6.com)



Foto: cookpad.com



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan Selamat atas

HARI OLAH RAGA NASIONAL 2023

